

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

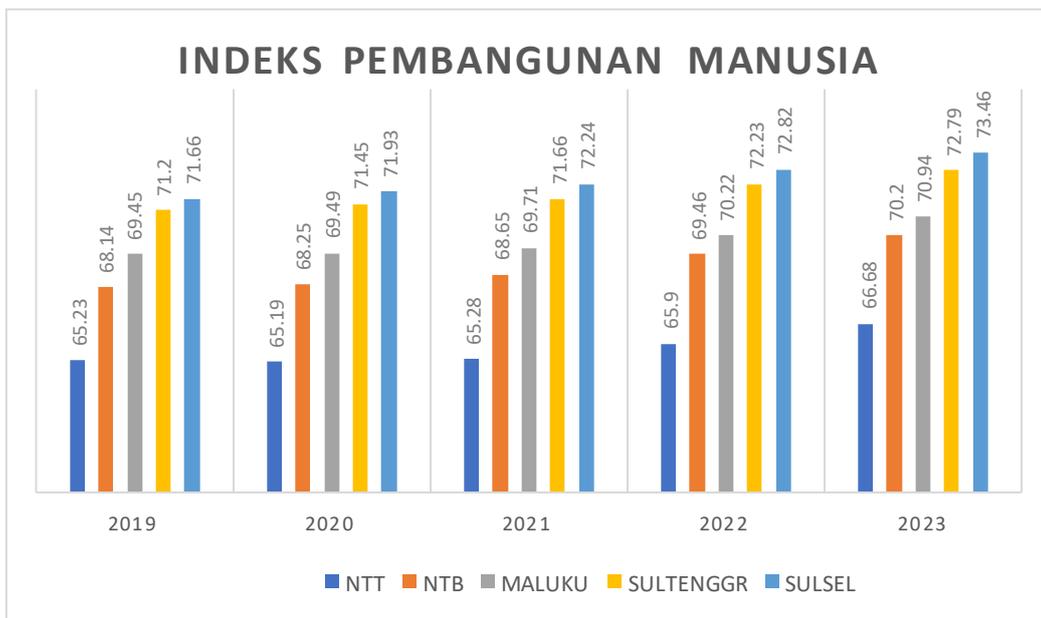
### **1.1. Latar Belakang**

Indeks Pembangunan Manusia digunakan sebagai tolok ukur penting dalam mengevaluasi kemajuan pembangunan suatu daerah dalam meningkatkan kualitas hidup penduduknya. IPM mempunyai 3 (tiga) aspek utama, diantaranya: kesehatan, pendidikan, dan standar kelayakan hidup (UNDP, 2021). Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan IPM sebagai tolok ukur untuk menilai kemajuan pengembangan kualitas hidup masyarakat berdasarkan sejumlah faktor penting dalam kualitas hidup. Dalam menilai kualitas hidup, terdapat tiga aspek utama, yaitu harapan hidup yang sehat dan panjang umur, tingkat pendidikan, dan kondisi hidup layak. Badan Pusat Statistik Indonesia sudah mengubah beberapa indikator yang tidak relevan dalam pengukuran IPM, seperti mengganti Angka Melek Huruf melalui Angka Harapan Lama Sekolah, serta mengganti istilah Produk Domestik Bruto dengan Produk Nasional Bruto (Ningrum et al., 2020a).

Dalam mencapai tujuan negara untuk mensejahterakan rakyat perlu adanya pembangunan ekonomi, yaitu proses perubahan oleh masyarakat tradisional yang beralih menjadi masyarakat modern yang mencerminkan perubahan pola aktivitas produksi dan konsumsi (Dumairy, 1999). Rostow menyatakan bahwa "pembangunan ekonomi atau proses transformasi dalam kehidupan masyarakat tradisional telah membentuk masyarakat yang modern dan hal ini merupakan suatu proses yang multidimensional" (Lestari et al., 2021). Dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, sumber daya manusia menjadi kunci penentu keberhasilan. Teori klasik adam smith menguraikan tentang ungkapan bahwa manusia ialah unsur

dalam produksi yang krusial yang menentukan kemakmuran bangsa. Sumber daya manusia juga penggerak dalam pertumbuhan ekonomi jika dialokasikan dengan efektif. (Mulyadi S., 2008)

Nusa Tenggara Timur menjadi provinsi yang perlu mendapatkan perhatian pada Indeks Pembangunan Manusia hal ini sangat penting karena provinsi ini masih menghadapi banyak tantangan pembangunan. Bukti dari hal ini adalah posisi Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selalu berada di peringkat 31 atau 32 dalam IPM secara nasional selama hampir sembilan tahun terakhir. Dari tahun 2015 hingga 2023, terdapat tiga provinsi, yakni Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua, yang memiliki IPM terendah. Meskipun ketiga provinsi ini mengalami peningkatan IPM setiap tahunnya, namun peningkatan tersebut tidak cukup untuk menyamai peningkatan IPM secara nasional yang juga terus meningkat setiap tahunnya (BPS NTT, 2022) (Vika Azkiya Dihni, 2022).

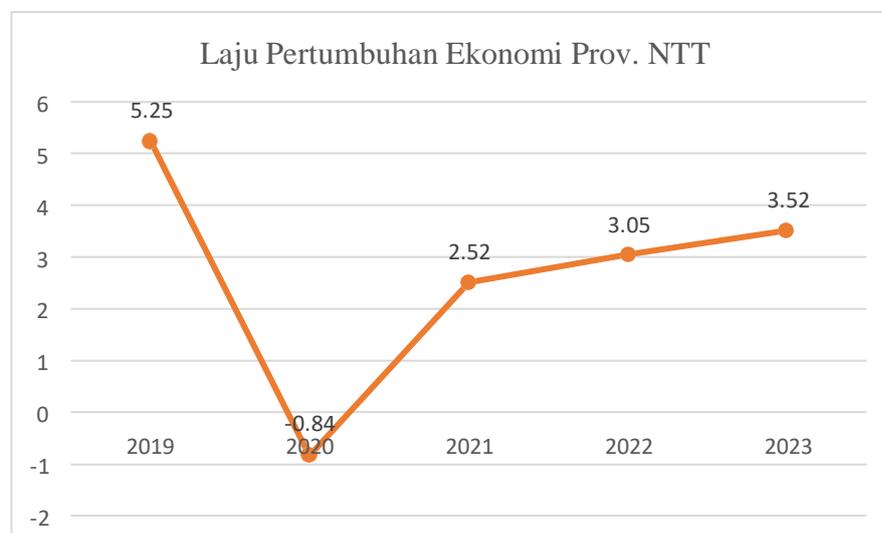


**Gambar 1. 1 Indeks Pembangunan Manusia Indonesia NTT, NTB, Maluku, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan**

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Dalam gambar diatas, nilai IPM Provinsi NTT mengalami penurunan di tahun 2020 sebesar 0,04% menjadi 65,19 kemudian di tahun 2021 terjadi peningkatan namun tidak signifikan di mana hanya sebesar 0,09%. Peningkatan IPM Provinsi NTT terus berlanjut di tahun berikutnya dengan nilai peningkatan yang lebih besar yaitu 0,62% pada tahun 2022 dan sebesar 0,78% hingga IPM Provinsi NTT menjadi 66,68 di tahun 2023. Namun perkembangan IPM di Provinsi NTT masih belum mampu mengejar ketertinggalannya dibandingkan dengan provinsi lain di Indonesia yang terdekat seperti NTB dan Maluku yang sudah mencapai angka 70 juga Sulawesi Selatan sebesar 73,46 dengan nilai IPM yang tidak berbeda jauh dengan IPM Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, dan belanja daerah merupakan faktor-faktor besar sehingga mempengaruhi IPM di NTT. Pertumbuhan perekonomian berkelanjutan diyakini mampu meningkatkan kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat, sehingga berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup (Todaro & Smith, 2015). Provinsi NTT merupakan wilayah dengan struktur perekonomian yang didominasi sektor pertanian, perkebunan dan perikanan. Pola pertumbuhan ekonomi di NTT cenderung berfluktuasi.

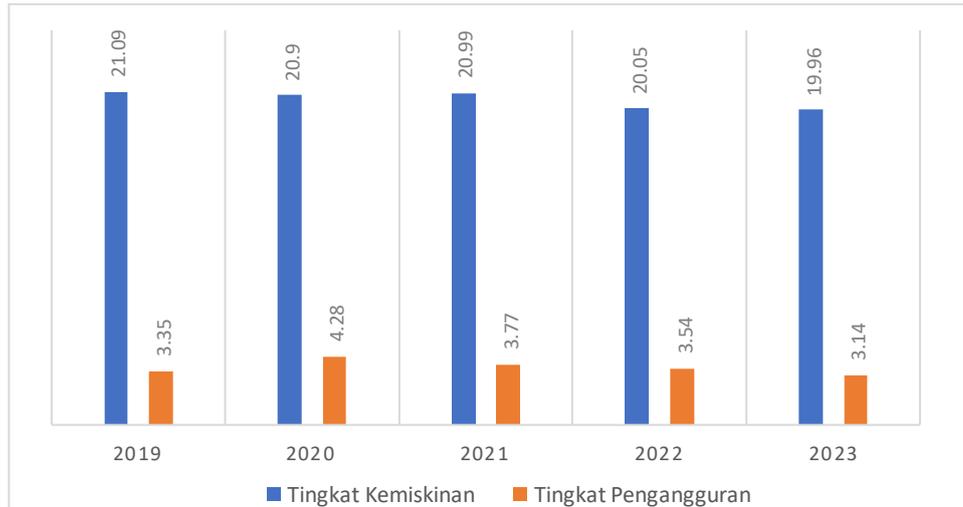


## **Gambar 1. 2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Provinsi NTT**

*Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)*

Dari grafik di atas, kecepatan dalam perkembangan perekonomian di Provinsi NTT ditampilkan melalui Produk Domestik Regional Bruto dalam lima tahun terakhir menunjukkan peningkatan yang tidak signifikan dari tahun 2021 sampai 2023 setelah mengalami penurunan saat covid di tahun 2020. Di tahun 2023 pertumbuhan ekonomi NTT berada di angka 3,52% yang masih tertinggal dari wilayah provinsi terdekatnya seperti Maluku yang sudah mencapai 5,21%. Hal ini menunjukkan peningkatan produktivitas masyarakat yang lambat yang dapat memengaruhi pemenuhan standar hidup yang layak yang menentukan nilai IPM.

Namun, kendati terjadi pertumbuhan ekonomi, tingkat kemiskinan dan pengangguran yang tinggi tetap menjadi permasalahan serius di Nusa Tenggara Timur (BPS Indonesia, 2022). Melalui riset yang dilakukan Jahtu, Aziz, dan Huda yang pada penelitiannya membahas terkait dampak dari kemiskinan, dampak pengangguran, dampak pertumbuhan ekonomi, serta dampak dari pengeluaran terhadap IPM dijelaskan bahwasannya kemiskinan diperkirakan memiliki kontribusi akan ketidakmerataan peningkatan IPM. Kondisi ini dipengaruhi dari adanya kemiskinan yang dinilai memberi penghambat untuk akses individu akan pendidikan layak serta layanan yang memadai di bidang Kesehatan. Kondisi tersebut disebabkan terbatasnya akses individu terhadap pendidikan yang berkualitas dan fasilitas kesehatan yang baik, yang pada akhirnya dapat menghalangi peningkatan kualitas sumber daya manusia dan memperburuk masalah pengangguran." (Ningrum et al., 2020a).



**Gambar 1. 3Tingkat kemiskinan dan pengangguran Provinsi NTT**

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Tingkat kemiskinan yang terjadi di NTT dalam 5 tahun belakangan menuai hasil berupa penurunan tingkat persentasenya di tahun 2019-2020 lalu kembali naik di tahun 2021 dan mulai menurun kembali pada tahun 2022-2023. Angka penduduk miskin juga mengalami fluktuasi yang sama, meningkat pada tahun 2020 di angka 20,9% dan mulai menurun pada tahun 2021-2023 walaupun nilainya tidak signifikan membuat Provinsi NTT menempati peringkat ke-3 provinsi dengan angka kemiskinan tertinggi setelah Papua Barat dan Papua. Kemiskinan yang tinggi menunjukkan adanya ketidakmampuan sebagian besar penduduk guna memaksimalkan kebutuhan pokok mereka, misalnya pendidikan serta kesehatan (Verawaty & Salwa, 2023). Kondisi seperti ini berdampak negatif terhadap IPM, karena warga dengan golongan tidak mampu bertendensi pada keterbatasan fasilitas publik seperti fasilitas pelayanan pendidikan yang baik juga pelayanan kesehatan yang memadai (Vika Azkiya Dihni, 2022).

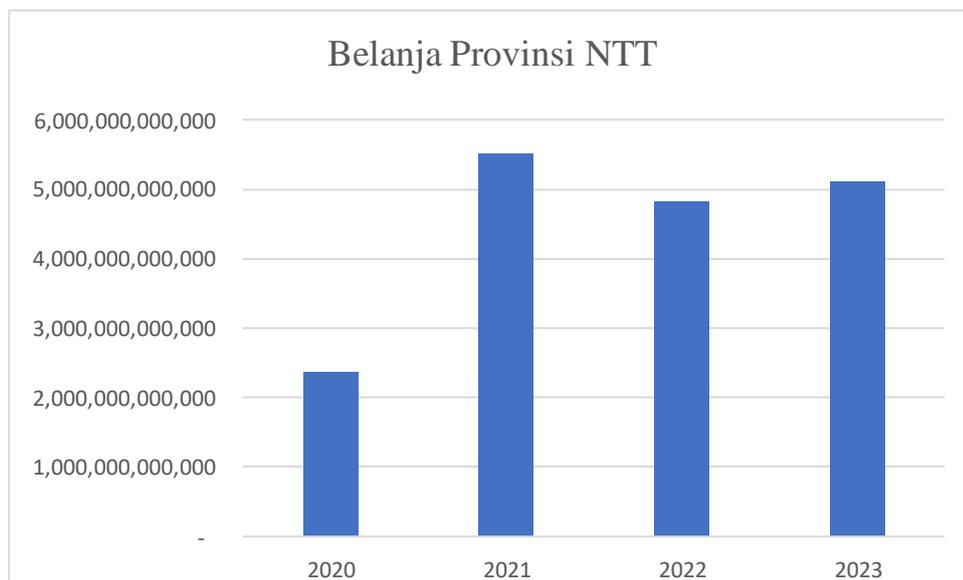
Selain itu, masalah ekonomi lain juga mampu berpengaruh pada indeks pembangunan manusia yaitu pengangguran. Pengangguran juga berkaitan erat

dengan kemiskinan sebab pengangguran menjadi faktor warga miskin tidak bisa memaksimalkan kebutuhan hidupnya akibat terbatasnya lapangan pekerjaan dan penghasilan yang tidak memadai sehingga konsumsi masyarakat berkurang. Tingginya tingkat pengangguran juga berkontribusi terhadap rendahnya IPM, karena pengangguran mengakibatkan penurunan daya beli masyarakat dan memperburuk kondisi sosial ekonomi (Dewi Puspita et al., 2021) .

Setiap tahun, pemerintah daerah menetapkan APBD sebagai strategi untuk mencapai target pembangunan pada tiap daerah. Langkah seperti ini sejalan terhadap keseriusan oleh otonomi daerah yang diimplementasikan selama diberlakukannya UU no. 22 tahun 1999 yang memuat terkait Pemerintahan Daerah. Menurut Jehuda Jean Sanny Mongan (2019), APBN dan APBD berfungsi sebagai wadah krusial bagi pemerintah. Dalam upaya mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, pemerintah daerah bertanggung jawab melaksanakan berbagai program secara desentralisasi tanpa sepenuhnya bergantung terhadap pemerintah pusat (Jehuda Jean Sanny Mongan, 2019).

Upaya pemerintah daerah dalam mengembangkan serta mengangkat persentase kondisi sumber daya manusia dibuktikan dari besarnya alokasi anggaran pemerintah pada tiga sektor, pada belanja sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur (Mongan, 2019). Pengeluaran pemerintah berperan dalam memberikan pelayanan dan fasilitas publik yang diperlukan masyarakat, yang belum bisa dipenuhi oleh pihak swasta dalam memenuhi kebutuhan masyarakat (Firly Annisa, 2023).

Mengutip dari (CNN Indonesia, 2023), Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT), Viktor Laiskodat, menguraikan bahwa hampir 50 persen dari APBD telah dialokasikan untuk pendidikan. Dju Yuanita dan koleganya (2023) menyebutkan bahwa peningkatan belanja pemerintah pada sektor kesehatan mampu menghasilkan dampak signifikan pada produktivitas tenaga kerja serta output. Penelitian sebelumnya memaparkan tentang belanja pemerintah untuk sektor pendidikan & kesehatan membawa pengaruh positif terhadap pembentukan IPM di Indonesia (Dju et al., 2023)



**Gambar 1. 4 Pengeluaran Pemerintah Provinsi NTT**

Sumber: Badan Pusat Statistik (data diolah)

Dalam ilustrasi diatas, anggaran yang keluar oleh pemerintah Provinsi NTT dalam 5 tahun tersebut bertendensi pada angka baik yang signifikan walaupun kenaikannya berfluktuasi. Di mana belanja daerah oleh pemerintah daerah juga ikut andil dalam berperan secara krusial di pembangunan manusia. Belanja daerah berpengaruh pada peningkatan kualitas pelayanan ataupun fasilitas bagi masyarakat baik pada bidang kesehatan dan pendidikan maupun infrastruktur, yang pada

gilirannya dapat menghasilkan dampak yang signifikan pada angka kenaikan IPM (Mardiasmo, 2021) .

Melihat fenomena yang telah dijelaskan tersebut, maka pembangunan dan dampak baik yang signifikan pada kualitas sumber daya manusia merupakan wujud yang krusial sebagai langkah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan penjelasan alasan yang melatarbelakangi nilai IPM di Provinsi NTT sekaligus dipengaruhi faktor Harapan Lama Sekolah, Angka Harapan Hidup dan Layak Hidup, dan Produk Nasional Bruto tetapi juga dapat dipengaruhi permasalahan ekonomi makro seperti angka kemiskinan dan pengangguran juga besarnya pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran pemerintah. (Aditya Andre Imanuel et al., 2021)

Dari asumsi diatas, penulis hendak melakukan penelitian tentang **”Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, Pengangguran dan Belanja Daerah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Nusa Tenggara Timur ”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Melalui latarbelakang tersebut, maka ditarik rumusan masalah dalam riset ini sebgai berikut di bawah ini:

1. Apakah ada pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Nusa Tenggara Timur?
2. Apakah ada pengaruh Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Nusa Tenggara Timur?
3. Apakah ada pengaruh Pengangguran terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Nusa Tenggara Timur?

4. Apakah ada pengaruh Belanja Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Nusa Tenggara Timur?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Tujuan riset ini ialah sebagai upaya guna mengetahui Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Pengeluaran Pemerintah, Tingkat Kemiskinan, dan Pengangguran di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adapun tujuan dari kegiatan riset ini yaitu:

1. Untuk menganalisis pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur
2. Untuk menganalisis pengaruh Kemiskinan terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur
3. Untuk menganalisis pengaruh Pengangguran terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur
4. Untuk menganalisis pengaruh Belanja Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Nusa Tenggara Timur

### **1.4. Manfaat Penelitian**

#### **1. Bagi Masyarakat Umum**

Bagi masyarakat umum dapat digunakan untuk sarana dalam memperluas dan meningkatkan pengetahuan serta sebagai bahan perbandingan dengan riset lain yang berhubungan dengan analisis dampak pendapatan asli daerah, belanja pemerintah, kemiskinan serta pengangguran IPM di NTT.

#### **2. Bagi Universitas**

Bagi Universitas, mampu meningkatkan upaya referensi di bidang akademis juga menambah koleksi dari perpustakaan Universitas Pembangunan

Nasional "Veteran" Jawa Timur dalam mendiskusikan atau juga menghasilkan solusi terhadap permasalahan dengan topik riset ini.

### **3. Bagi Peneliti**

Bagi peneliti, dapat menambah pengalam dan pengetahuan terkait tata cara penulisan karya ilmiah yang baik dan juga melatih diri dalam memecahkan masalah.

### **4. Bagi Pemerintah Daerah**

Bagi pemerintah daerah, dapat dijadikan referensi atau rujukan dalam merumuskan kebijakan ekonomi dan pengambilan keputusan dalam perencanaan program pembangunan yang sesuai.